

GEJALA-GEJALA PENYESUAIAN PETANI
DAN SISTEM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN
SEKITAR WADUK KEDUNGOMBO

Oleh

Ir. Saharuddin*)

PENDAHULUAN

Dasar Pemikiran

Adanya Waduk Kedungombo secara langsung menimbulkan perubahan ekologi. Dari sisi petani sebagai "korban" memerlukan penyesuaian baik terhadap lingkungan baru, maupun terhadap kondisi sosial ekonomi yang dihadapi. Sedangkan dari sisi perhutani diperlukan pengelolaan yang mantap terhadap sumberdaya hutan, yang paling tidak harus dapat mengembangkan tiga fungsi berikut:

1. Memberikan keuntungan bagi perum perhutani,
2. Memberikan pelayanan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya,
3. Sebagai *cacthment area* dari Waduk Kedungombo, maka hutan di sekitar ini harus berperan sebagai hutan lindung dalam rangka konservasi tanah untuk mencegah adanya sedimentasi terhadap Waduk Kedungombo.

Hutan di sekitar Waduk Kedungombo tergolong sebagai hutan rawan sosial, ekonomi dan bahkan rawan secara ekologi akibat dari kondisi tanah hutan yang berbukit dan bergelombang. Oleh sebab itu perlu adanya sistem pengelolaan terhadap sumberdaya hutan yang secara khusus bagi hutan di kawasan ini.

Dalam menentukan kebijaksanaan, maka perlu terlebih dahulu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: (1) Bagaimana kondisi agraris (lahan pertanian) dan kondisi hutan sekitar Waduk Kedungombo, (2) Bagaimana kemampuan sosial ekonomi petani sekitar hutan dan gejala-gejala yang mungkin timbul akibat proses penyesuaian yang berlangsung, (3) Bagaimana sifat ketergantungan petani sekitar hutan terhadap sumberdaya hutan dan implikasinya terhadap kerawanan hutan dan (4) Bagaimana proses pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan yang pernah ada.

*) Asisten Peneliti Pada Pusat Studi Pembangunan (PSP)-IPB

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk melihat gejala-gejala sosial ekonomi yang mungkin timbul akibat "proses penyesuaian" yang sedang berjalan, (2) Untuk melihat kemampuan sosial ekonomi petani sekitar hutan, (3) Untuk melihat sifat-sifat ketergantungan petani terhadap sumberdaya hutan, dan (4) Untuk menelaah sistem pengelolaan sumberdaya hutan secara historis. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan bagi pengelolaan sumberdaya hutan di sekitar Waduk Kedungombo, serta bagi pengembangan perhutanan sosial pada khususnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini (menurut encana) dilaksanakan dilaksanakan di 5 pedukuhan di sekitar Waduk Kedungombo, Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, atau lingkungan keasperan Guwo dan Kemus, KPH Telawa. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena wilayah ini terletak di sekitar hutan dan sedang mengalami "proses penyesuaian" secara sosial, ekonomi dan ekologi akibat sebahagian besar lahan pertanian penduduk tergenang Waduk Kedungombo.

Jangka waktu penelitian telah berjalan 2,5 bulan yakni November 1989 s/d Januari 1990, dari 3,5 bulan yang direncanakan.

Metode Pengambilan Contoh dan Jenis Data

Pengambilan contoh ditentukan dengan sistem "snow balling" yang menghasilkan pelapisan dalam sampel. Di setiap pedukuhan dipilih 10 responden kasus secara berlapis dan dilakukan penyusunan riwayat hidup sampai dua generasi untuk 3 responden diantara 10 responden kasus berlapis untuk menelaah kehidupan masyarakat secara historis.

Pengumpulan data primer juga dilakukan dengan pengamatan berpartisipasi disamping wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dan disesuaikan di lapangan. Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dari beberapa lembaga terkait.

Metode Analisa Data

Data kualitatif dianalisa secara kualitatif, sedangkan data kuantitatif dipakai untuk mempertajam analisa, yang disajikan secara deskriptif. Untuk menentukan tingkat hidup petani dipakai garis kemiskinan Sajogyo (240 kg setara beras/kapita/tahun). Sedangkan luas lahan minimum untuk hidup layak dikonversi dari

garis kemiskinan tersebut dengan pendekatan 2 x 240 kg setara beras/kapita/tahun atas produktiitas pertanian dari lahan milik yang digarap, dengan tingkat harga yang berlaku di lokasi penelitian selama pengamatan.

RIWAYAT KEHIDUPAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

Diperkirakan di wilayah desa penelitian (Klewor dan Geneng-sari) telah mulai pertanian menetap sejak sebelum tahun 1920-an. Pada saat itu sebahagian penduduk telah memiliki "tanah jatah" dari negara dengan status milik yang didasarkan atas "biet" (Surat Keterangan Tanah Milik). Pemilikan tanah tersebut berlangsung secara "wiwit" (turun temurun) dengan luas sekitar 1,5 hektar per. Akibatnya tanah mengalami proses fragmentasi dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam lingkungan keluarga. Akibat dari proses fragmentasi ini tanah pertanian semakin "gurem" dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu mengakibatkan pula struktur sosial komunal yang berdasarkan geneologis.

Kehidupan masyarakat sebelum tahun 1920-an ternyata tidak saja mengandalkan sektor pertanian, melainkan sektor perdagangan telah turut berperan dalam ekonomi rumah tangga. Perdagangan yang dominan pada masa itu adalah perdagangan meubel (ke luar desa) dan tembakau (masuk desa), yang dilakukan secara berkelompok dengan berjalan kaki atau menunggak kuda ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah. Perdagangan yang hanya berlangsung di dalam dan di sekitar desa adalah perdagangan ternak besar (kambing aau sapi).

Diperkirakan pada awal tahun 1970-an pola hidup merantau semakin meluas, tidak saja di bidang perdagangan meubel, tetapi juga pada sektor jasa, industri dan perdagangan lainnya di kota. Para tukang kayu sebahagian mengadakan perantauan dan bekerja pada bidang pertukangan di kota-kota terdekat sedangkan sebahagian lainnya tetap melanjutkan pertukangan kayu di desa. Sebahagian masyarakat lainnya merantau dengan pola musiman dan bekerja pada sektor industri, jasa dan perdagangan di kota. Dalam keadaan demikian maka peragangan atau aktivitas ekonomi pasar di dalam desa hampir sepenuhnya dikuasai oleh wanita.

Penelusuran lebih lanjut, ternyata alasan merantau hanya satu, yakni mencari nafkah. Ini berarti bahwa sejak sebelum tahun 1970-an sektor pertanian desa tidak lagi mampu mendukung perekonomian desa. Dengan kata lain daya dukung internal telah merosot sejak beberapa dasawarsa yang telah berlalu.

GEJALA-GEJALA PENYESUAIAN PETANI

Strategi Bertahab Hidup

Kehidupan petani dalam keseimbangan lama (sebelum adanya Waduk Kedngombo) telah diwarnai dengan kondisi "lapar lahan".

Gejala ini dapat dilihat dari perkembangan mata pencaharian penduduk dimana sejak tahun 1977 petani sendiri tidak lebih dari 35% . Sepuluh tahun kemudian golongan ini menurun sebesar 10%. Ini berarti bahwa dalam keseimbangan lama telah terjadi pergeseran kesempatan kerja dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Gejala lain menunjukkan telah terjadi proses fragmentasi tanah akibat pemilikan secara ekstafet dengan "azas pemerataan" dalam lingkungan keluarga keturunan. Penyesuaian dalam keseimbangan lama di atas ditempuh dengan pola hidup merantau 2 s/d 3 bulan di kota-kota besar bagi kaum pria (kepala rumahtangga). Sudah menjadi fenomena sosial di kawasan ini, bahwa setiap menjelang musim tanam para "migran sirkuler" kembali untuk menggarap lahan pertanian "gurem" disamping memanfaatkan/menggarap "jengklengan" (tanah hutan) yang digarap secara tumpangsari.

Sejak adanya waduk Kedungombo, para petani umumnya belum mencapai keseimbangan baru. Suatu kekecualian bagi responden lapisan bawah di desa Klewor, mereka tetap "mapan" dengan mata pencaharian pertukangan yang bahan bakunya diperoleh secara ilegal, dimana mereka berperan sebagai "tangan ketiga" dalam rantai tataniaga kayu ilegal yang dimaksud; yang bersumber dari kawasan hutan sekitar waduk.

Dalam proses penyesuaian ini sektor pertanian tidak lagi menjadi sumber penghasilan utama di kedua desa penelitian. Proporsi terbesar dari pendapatan rumahtangga bersumber dari non pertanian, sekalipun proporsi tersebut berbeda antar lapisan. Pola-pola penghasilan rumahtaggam dapat dikatakan tidak permanen pada berbagai sektor karena para petani menempuh suatu "strategi bertahan hidup" dengan memanfaatkan segala kesempatan yang sifatnya temporer dan dalam jangka pendek.

Pemanfaatan Sumberdaya Hutan

Keberadaan hutan dalam memberi kesempatan kerja kepada para petani merupakan "daya tarik desa" pada musim hutan bagi para perantau di kota-kota besar. Sekalipun kondisi tanah sangat kritis dari unsur hara namun para petani dengan pertimbangan "rasional secara ekonomi" tetap mempunyai semangat besar dalam menggarap tanah hutan. Hal ini terungkap dari beberapa penuturan berikut:

"Saya dulu merantau di Jakarta, tetapi setelah mendapat "jengklengan" maka lebih baik saya merantau setelah panen dan kembali menjelang musim hujan. Penghasilan di Jakarta pada musim hujan jauh berkurang dibanding dengan pada musim kemarau".

"Saya sudah tujuh tahun menggarap "jengklengan". Di salah satu petak pada jarak tanam pokok 3 x 2 m saya dapat menggarap selama lima tahun. Memang hasilnya menurun pada tahun-tahun terakhir, tetapi itu tergantung dari bagaimana pupuknya. Sekarang saya bisa menggarap "jengklengan" pada perhutanan sosial sampai 25 tahun. Dengan jarak tanam pokok



6 x 1 m, kami lebih bebas. Menghadapi tanaman rindang kami akan menanam tanaman rempah, dan itu tergantung dari keputusan kelompok (KTH)".

Kesediaan mereka dalam menggarap "jengklengan" tidak saja karena mereka "lapar lahan" tetapi juga karena mereka lapar dalam pengertian yang sebenarnya. Tidaklah mengherankan jika ketergantungan mereka terhadap sumberdaya hutan tidak saja pada lahan hutan, tetapi juga pada sumberdaya hasil hutan yang lebih dekat kepada gangguan keamanan hutan. Bentuk-bentuk pemanfaatan hasil hutan yang dimaksud adalah: pencurian kayu/penebangan liar, pembuatan arang atau pembakaran arang di tengah hutan jati, pengambilan daun jati untuk kepentingan perdagangan, pengambilan kayu bakar dan perencekkan di hutan serta penggembalaan dan pengambilan pakan ternak di dalam hutan termasuk pemangkasan Lamtoro merah (*Leucaena glabrata*) yang sengaja ditanam oleh pihak Perhutani untuk melindungi pengikisan air terhadap tanah hutan.

Kemiskinan Petani

Berdasarkan pendekatan pengeluaran, maka diperoleh tingkat pendapatan (pengeluaran) sebesar rata-rata 317 kg setara beras/kapita/tahun dengan kisaran antara 221,6 - 487,6kg setara beras/kapita/tahun, untuk responden sampel di dukuh Grogol dan Balirejo (desa Genengsari) dan 479 kg untuk dukuh Gumukrejo dan Ngleban (desa Genengsari) dengan kisaran antara 219,2 - 504,25 kg. Ini berarti bahwa petani responden sampel masih berada dalam kisaran garis kemiskinan Sajogyo. Pemisahan analisa di atas didasarkan atas pertimbangan bahwa ketergantungan petani terhadap sumberdaya hutan diantara kedua desa sangat berbeda. Petani di desa Genengsari pada umumnya mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya hutan. Di desa Klewor, ketergantungan "mutlak" terhadap hasil kayu hutan dijumpai pada responden sampel di dukuh Gumukrejo.

Melihat gejala kemiskinan di atas, maka wajar hasil survey sampel di daerah genangan Waduk Kedungombo tahun 1985 menunjukkan bahwa 55% penduduk mempunyai pendapatan di bawah garis kemiskinan (kuang dari 240 kg setara beras/kapita/tahun. Demikian pula hasil penelitian Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (Sub-BRLKT Salatiga) 1985 diperoleh nilai pendapatan perkapita pertahun sebesar 314,76 kg setara beras untuk kawasan sub-DAS Karangboyo. Demikian pula jika dilihat dari alokasi ekonomi maka rata-rata 76,02% dari pengeluaran ditujukan untuk makanan, selebihnya untuk memenuhi kebutuhan non pangan.

Jika dilihat dari sisi pemilikan lahan pertanian rata-rata pemilikan responden seluas 650 m² per jiwa dengan tingkat produktivitas lahan pertanian rata-rata sebesar 467,8 kg setara beras/ha/tahun. Padahal luas lahan minimal untuk hidup layak yang diperoleh dari konversi 480 kg setara beras/kapita/tahun pada tingkat produktivitas lahan di atas adalah 0,95 ha/jiwa. Nilai ini jelas jauh lebih besar dibanding dengan luas lahan

yang mereka miliki dewasa ini. Kenyataannya proporsi terbesar dari pendapatan responden (telah termasuk penghasilan dari tanah hutan) berasal dari sektor non pertanian dengan perincian: sektor pertanian 38 %, buruh tani dan buruh lainnya 45% dan perdagangan dan industri 16,5 %.

Dengan uraian di atas jelas bahwa kondisi kehidupan masyarakat/petani sekitar hutan kawasan Waduk Kedungombo tidak saja "lapar lahan" tetapi juga lapar dalam pengertian yang sebenarnya karena tidak memiliki sumberdaya ekonomi yang memadai. Oleh sebab itu ketergantungan terhadap sumberdaya hutan maupun terhadap hasil-hasil hutan sangat besar.

PERKEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN

Tinjauan Historis

Berdasarkan penelusuran terhadap riwayat hidup beberapa responden dan informasi dari tokoh-tokoh informan ditemukan bahwa sebelum tahun 1920-an, masyarakat desa sekitar waduk Kedungombo telah hidup dengan pola pertanian menetap. Pada saat itu sistem pengawasan sumberdaya hutan sangat ketat. Hutan di kawasan ini, termasuk hutan di sekitar pemukiman penduduk merupakan hutan produktif. Namun pada saat yang bersamaan berkembang pula industri meubel rumah tangga yang menyentuh hampir semua lapisan masyarakat. Sekalipun demikian, sampai menjelang perang kemerdekaan tetap aman.

Diperkirakan segera setelah berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda kondisi keamanan hutan semakin tidak terkendali. Diduga masyarakat semakin berani memasuki hutan untuk berbagai kepentingan baik menebang kayu untuk kepentingan industri rumah tangga meubel, konsumsi kayu bakar dan untuk keperluan lainnya termasuk penggembalaan. Hal ini diperkirakan berlangsung terus hingga awal tahun 1970-an. Akibatnya, dewasa ini sumberdaya hutan sampai kira-kira radius 1 km dari pemukiman penduduk tampak gundul.

Di sisi lain sebelum kemerdekaan sudah berlangsung tumpang-sari biasa di tanah hutan. Tanah hutan garapan dikenal oleh masyarakat sebagai "jengklengan" atau "kukuran". Dengan demikian sejak generasi sebelumnya masyarakat telah teradaptasi dengan ekologi pertanian hutan yang bergandengan dengan ekologi pertanian lainnya (sawah dan tegalan). Konon semua kawasan hutan yang berada di sekitar waduk dewasa ini merupakan hutan yang ditumbuhkan oleh petani sekitarnya.

Seorang tokoh masyarakat mengisahkan peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1976. Pada saat itu hutan rawan dengan berbagai bentuk interaksi masyarakat yang bersifat negatif. Langkah yang ditempuh oleh "sinder" (BKPH/Asper) memperluas areal "jengklengan" dan memnghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama

membangun dan memelihara hutan. Jalan keluar yang juga diberikan kepada masyarakat adalah dianjurkan untuk merantau atau bekerja di kota pada saat musim kemarau dengan memanfaatkan keterampilan yang mereka miliki yang umumnya sebagai pengrajin meubel. Dengan cara ini pencurian kayu dapat ditekan paling tidak untuk penduduk desa Genengsari, namun secara "pasif" tetap menopang adanya pencurian kayu di hutan oleh masyarakat desa lainnya. Peran mereka beralih dari penebang kayu menjadi tukang tadah kayu gelap bersamaan dengan mulai menggejalanya pola hidup merantau bagi berbagai lapisan masyarakat.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Dewasa Ini

Pengelolaan sumberdaya hutan dewasa ini terdapat perkembangan dibanding beberapa tahun silam. Namun dalam tulisan ini hanya disajikan secara terbatas mengenai praktek pengelolaan sumberdaya hutan di lingkungan keasperan Kemusu dan Guwo sebagai wilayah pengamatan. Kedua wilayah hutan ini merupakan "wilayah operasi" kelompok sasaran penelitian.

Perkembangan pengelolaan sumberdaya hutan yang dimaksud dilihat dari sisi praktek-praktek perhutani baik pada jajaran Perum Perhutani pada tingkat paling rendah maupun praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat. Perkembangan yang dimaksud adalah pergeseran dari sistem tumpangsari biasa, ke arah Insus Tumpangsari dan Perhutanan Sosial.

Pada sistem tumpangsari biasa peranan pihak Perhutani hanya sebagai pihak yang memutuskan atas "jengklengan" yang akan dikelola oleh petani dan menyerahkan bibit tanaman kehutanan kepada petani untuk ditanam di "jengklengan". Sekalipun demikian proses pengelolaan seperti ini tetap berjalan secara kontinyu dan telah berlangsung selama beberapa dasawarsa. Hal ini terdapat baik di lingkungan keasperan Kemusu maupun keasperan Guwo. Sekalipun demikian ada perbedaan yang menyolok mengenai sikap masyarakat petani sekitar hutan antara kedua keasperan di atas. Di lingkungan keasperan Kemusu telah menjadi "langganan" kebakaran hampir setiap tahun yang diidentifikasi sebagai motif kesengajaan. Menurut kalangan Perhutani setempat dan tokoh-tokoh informan lainnya ini adalah konsekuensi logis dari kondisi kehidupan yang masyarakat yang "lapar lapar lahan", karena dengan demikian petani berharap memperoleh kesempatan untuk mendapatkan "jengklengan" sekalipun dengan luasan yang kecil yakni 1/8 s/d 1/4 ha per KK.

Dalam sistem Insus Tumpangsari, petani memperoleh kemudahan dalam pengadaan sarana produksi pertanian. Dengan sistem ini petani juga memperoleh pupuk dan bibit untuk komoditi yang diperlukan khususnya jagung dengan pengembalian 50% kepada Perum Perhutani. Bersamaan dengan itu, Mandor Kehutanan tidak lagi sekedar membagikan "jengklengan" dan benih dari tanaman kehutanan tetapi juga secara aktif mengontrol pembagian sarana produksi di atas melalui Kelompok Tani Hutan (KTH). Selain itu Mandor Kehutanan secara aktif bekerjasama dengan Penyuluh Pertanian

Lapangan (PPL). Sistem Insus Tumpangsari ini baru diberlakukan dalam tahun terakhir ini (1989). Kewajiban petani adalah menanam dan memelihara tanaman kehutanan, tanaman pagar dan tanaman sisipan.

Model yang terakhir diperkenalkan adalah Perhutanan Sosial. Model ini baru dilaksanakan di lingkungan keasperan Guwo, yakni RPH Guwo, RPH Ngrombo dan RPH Bogor. Sistemnya hampir sama dengan Insus Tumpangsari. Perbedaannya hanya terletak pada intensitas pelayanan dan pembinaan serta jarak tanaman pokok.

Dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial, kerjasama dengan PPL lebih intensif. Terasering pada lahan miring dilaksanakan sendiri oleh petani dengan upah dari Perum Perhutani yang disalurkan menjadi keuangan KTH. Jarak tanam tanaman pokok diperluas menjadi 6 x 1 m dari pelaksanaan tumpangsaribiasa dengan jarak tanam 3 x 2 m.

Dengan adanya sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan melibatkan petani sekitar hutan maka diperkirakan lebih dari 60% rumahtangga sekitar hutan adalah penggarap hutan. Bahkan untuk senahagian besar rumahtangga proporsi penghasilan dari sektor pertanian berasal dari tumpangsari.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASINYA

1. Para petani "korban Waduk Kedungombo, kini sedang berada dalam proses penyesuaian, baik secara sosial, ekonomi maupun ekologi. Kondisi kehidupan belum stabil karena para petani khususnya dari desa Genengsari dan desa Klewor umumnya masih menggarap tanah "pasang surut" karena Waduk Kedungombo di kawasan ini surut seperti sediakala. Oleh sebab itu kehidupan petani "korban" masih belum menentu.
2. Kondisi kehidupan petani di beberapa dukuh penelitian adalah miskin dengan kisaran kemiskinan berada pada skala miskin sekali hingga nyaris miskin. Namun demikian mereka tetap mempunyai "identitas diri" serta lepas dari ketergantungan sosial. Berhubung karena miskinnya, maka mereka hanya mempunyai sumberdaya ekonomi yang sangat terbatas. Bahkan sebagian petani tidak dapat lagi memfungsikan sumberdaya ternak yang mereka miliki yang selama beberapa tahun silam merupakan sumber penghasilan rumahtangga yang sangat penting. Dalam kondisi demikian, maka ketergantungan terhadap sumberdaya hutan dan daya dukung eksternal sangat besar. Hal ini terjadi karena daya dukung pertanian sudah sejak lama tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan hidup masyarakat kawasan ini.
3. Terbatasnya sumberdaya pertanian (lahan) menyebabkan petani "lapar lahan" untuk usahatani. Kondisi ini bukanlah semata-mata akibat adanya Waduk Kedungombo, tetapi lebih diakibatkan oleh fregmentasi tanah yang yang berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. Pola hidup merantau di kawasan ini merupakan pola yang telah "mapan" dalam berbagai lapisan masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan tidak ada garis pemisah antar lapisan. Berhubung pola hidup merantau telah "mapan" di kalangan masyarakat, maka profil ekonomi rumahtangga diwarnai dengan pola penghasilan ganda yang beragam dan telah berlangsung lama. Oleh sebab itu adanya Waduk Kedungombo yang "menelan" sebahagian besar tanah pertanian tidak secara drastis mempengaruhi pola penghasilan rumahtangga. Gejala yang dapat dilihat dengan adanya Waduk Kedungombo adalah pergeseran proporsi penghasilan rumahtangga dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian. Hal ini lebih menonjol dalam proses penyesuaian yang sedang berlangsung dari pada perubahan mata pencaharian.
5. Kondisi hutan sekitar Waduk Kedungombomerupakan hutan rawan dari berbagai aktivitas ekonomi masyarakat sekitarnya. Kondisi ini merupakan fenomena yang telah berlangsung sejak lama sejalan dengan proses fragmentasi tanah pertanian, bukan akibat langsung dari kehilangan lahan pertanian karena adanya waduk. Karena itu ketergantungan terhadap sumberdaya hutan dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama yang bersifat "positif" yakni berupa pemanfaatan tanah hutan dengan sistem tumpangsari biasa maupun Perhutanan Sosial. Sisi yang kedua adalah lebih condong ke arah interaksi "negatif" yang berupa pemanfaatan hasil-hasil hutan. Kedua sifat ketergantungan ini dipisahkan oleh persepsi masyarakat terhadap lingkungan hutan, bukan oleh bentuk pemanfaatan di atas.
6. Proses pengelolaan sumberdaya hutan di kawasan penelitian secara historis telah sejak lama mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan. Namun dari sisi pengawasan mengalami "pasang surut" sesuai dengan perkembangan politik. Hal ini ditandai dengan melemahnya sistem pengawasan segera setelah berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda hingga tahun 1970-an. Namun, perkembangan dewasa ini lebih condong pada melayani kepentingan masyarakat sekitar hutan daripada mencegah aktivitas-aktivitas masyarakat yang potensial bagi gangguan keamanan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadarma, Adiatma. 1989. Spektrum Lain Kasus Kedungombo. Tenggapan atas Tulisan Pamuji MS. Suara Merdeka, 24 Juli 1989. Semarang.
- Anonim. 1989. Proceeding Lokakarya Perhutanan Sosial Tingkat Administratur dan Kepala Seksi. Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, tanggal 7 s/d Nopember 1989. Semarang.

Anonim. 1988. Kedungombo Restlemenand Reservoir Development Program. Final Report. Direktorat General of Water Resources Development Jratumseluna River Basin Development Project. Semarang. Tidak Dipublikasikan. Balai Rehabiltasi Lahan dan Konservasi Tanah Sub DAS Serang Hulu. Buku I (Buku Utama) dan Buku II (Lampiran Teknik). Maret, 1988. Salatiga.

DISKUSI SIDANG SEMINAR KE TUJUH

Penanya: William Sunderlin

1. Apa ada tugas-tugas wajib (misalnya, penutupan akar, pemberian tanaman peneduh) yang berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan tanaman pokok ?
2. Apabila ada tugas-tugas wajib, apakah ada variasi motivasi pesanggem dalam pelaksanaan tugas tersebut ?

Jawab: Masliansyah

1. Ada, yaitu pemupukan tanaman palawija dan terracering;
2. Ya ada, pemupukan dimaksudkan untuk mempengaruhi kesuburan tanah di sekitarnya, sedangkan terracering untuk mencegah erosi.

Penanya: Ida

1. Bagaimana proses pembagian andil yang ada di RPH Kasembon; pengurus dan tokoh formal mendapat garapan lebih luas merupakan kesepakatan bersama atautkah hanya sepihak ?

Jawab: Masliansyah

1. Ada dua cara pembagian andil, yaitu: Di Desa Margasari, secara spesifik bergiliran tiap tahun. Sedangkan di desa lainnya, pemrakarsa mencari anggota yang memenuhi syarat untuk menggarap lahan perhutanan sosial.

Penanya: Jejen

1. Pembinaan di lokasi tersebut masih bersifat monoton. Metode pembinaan semacam apa yang dilaksanakan di sana ? Model pembinaan apa yang anda sarankan agar tidak monoton ?
2. Bagaimana saudara mengukur tingkat motivasi KTH, dan berikan gambarannya.

Jawab: Masliansyah

1. Pembinaan monoton, yaitu cara yang dilakukan sama tiap waktu. Materi penyuluhan yang diberikan oleh petugas Perhutani sama. Hal-hal untuk merangsang masyarakat untuk bertanya kurang dilakukan;

Saya menyarankan pembinaan yang dilakukan lebih bervariasi, misalnya dengan simulasi, supaya lebih mengena, karena dengan simulasi tukar pendapat yang dilakukan lebih bebas. Dapat juga dengan metode langsung di lapangan (praktek) dengan menggunakan plot-plot contoh;

2. Mengukur tingkat motivasi KTH dengan menggunakan kuesioner dengan kelas penilaian tinggi, sedang dan rendah; Diantaranya yaitu, kegairahan kerja, keinginan untuk berprestasi yang meliputi faktor produksi, sikap mental dan harapan.

Penanya: Mas'ud Yunus

1. Mohon diberikan konsep operasional dan dijelaskan apa yang dimaksud dengan "sikap mental" dalam penelitian anda ?
2. Parameter-parameter apa yang anda gunakan untuk mengukur atau menyatakan tinggi rendahnya sikap mental ?

Jawab: Masliansyah

1. Sikap mental yaitu produk dari suatu proses sosial yang beraksi sesuai dengan rangsangan yang diterima. Misalnya perasaan sebelum dan sesudah mengikuti program Perhutanan Sosial;
2. Parameter sikap mental yaitu:
 - a. Sikap dan tanggung jawab;
 - b. Kepribadian;
 - c. Ilmu pengetahuan;
 - d. Inovasi.

Untuk mengukur sifat sosial, sukar dilakukan, sehingga dipergunakan sistem kuesioner dan diharapkan dapat mencakup secara garis besarnya.

Penanya: Jejen

1. Bagaimana kegiatan para penduduk sebelum dan sesudah adanya waduk Kedung Ombo ?
2. Apakah luas lahan yang mereka miliki dapat mencukupi dan apa kira-kira kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan ?

Jawab: Saharuddin

1. Kegiatan sektor pertanian telah ada sebelum adanya waduk Kedung Ombo. Setelah adanya waduk dan tanah pertanian menjadi tenggelam, mereka terpaksa bekerja di luar atau non pertanian.
2. Tidak, terdapat kesenjangan antara luas lahan yang dimiliki dengan luas lahan untuk hidup layak. Kegiatan pertanian yang tepat, yaitu dalam bidang perikanan, seperti memancing, dan lain-lain.